

Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Analysis of Performance Accountability Report at The Provincial Regional Health Service North Sulawesi

Aryani K. Waworundeng¹, Novi Swandari Budiarto², Stanley Kho Walandouw³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : aryanitann@gmail.com¹, novi.sbudiarto@unsrat.ac.id², stanleykho99@gmail.com³

Abstrak : Akuntabilitas didalam sektor publik digambarkan sebagai hubungan antara masyarakat dan pemerintah, dimana pemerintah berperan sebagai agen yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat sebagai prinsipal, baik secara langsung maupun tidak langsung dan hanya diwakilkan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi sektor publik dalam menghasilkan pelayanan publik menjadi lebih baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 menunjukkan bahwa potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis laporan akuntabilitas kinerja program kegiatan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah memenuhi syarat *value for money*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dinilai dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sebagian besar menunjukkan keberhasilan pada pelaksanaan program pembiayaan kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengukuran kinerja, Laporan Akuntabilitas

Abstract : *Accountability in the public sector is described as the relationship between the community and the government, where the government acts as an agent who is given the authority to carry out the obligations determined by the community as the principal, either directly or indirectly and only represented. Performance measurement is very important to assess the accountability of public sector organizations in producing better public services. The 2019 North Sulawesi Provincial Health Agency Performance Accountability Report shows that the potential and problems of health development will be input in determining the policy direction and strategy of the North Sulawesi Provincial Health Office. The analytical method used is descriptive qualitative. This study aims to determine and analyze the accountability report on the performance of activity programs at the Regional Health Office of North Sulawesi Province that has met the value for money requirements. The results showed that the performance accountability at the Regional Health Office of North Sulawesi Province assessed from the economic, efficiency, and effectiveness aspects mostly showed success in the implementation of public health financing programs.*

Keywords: *Accountability, Performance measurement, Accountability Report*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas didalam sektor publik digambarkan sebagai hubungan antara masyarakat dan pemerintah, dimana pemerintah berperan sebagai agen yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat sebagai prinsipal, baik secara langsung maupun tidak langsung dan hanya diwakilkan. Akuntabilitas yang dimaksud yaitu kemampuan untuk menunjukkan

Diterima: 26-07-2022; Disetujui untuk Publikasi: 07-09-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

bagaimana pertanggungjawaban seluruh aktivitas dan terhadap kinerja finansial apakah sudah ekonomis, efisiensi dan efektif (*value for money*) melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi sektor publik dalam menghasilkan pelayanan publik menjadi lebih baik. Kinerja instansi pemerintah dapat dikatakan baik jika mampu merealisasikan rencana anggaran dalam memenuhi tujuan yang ditetapkan dengan berpedoman pada standar pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif.

Tingkat keberhasilan instansi pemerintah harus memperhatikan seluruh aktivitas yang diukur tidak semata-mata pada input dari program instansi tetapi lebih ditekankan pada output, proses, manfaat dan dampak dari program instansi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui suatu pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih terlihat dari kemampuan instansi berdasar sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang tertuang dalam perencanaan strategis. Salah satu instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi seluruh aktivitas dan kinerjanya kepada masyarakat adalah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 menunjukkan bahwa potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini akses ibu hamil, bersalin dan nifas terhadap pelayanan kesehatan sudah cukup baik, namun angka kematian ibu masih tergolong cukup tinggi. Kondisi ini disebabkan karena kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin yang belum memadai, kondisi ibu hamil dengan komplikasi dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan, perdarahan post partum, dan juga penyebab karena lain-lain yang semakin meningkat. Penyebab dan komplikasi kematian ini bisa diminimalisir jika kualitas *Antenatal Care* dilaksanakan dengan baik, sehingga ibu hamil mampu memeriksa kelainan sedini mungkin. Melalui program pembinaan kesehatan masyarakat yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 diharapkan dapat membantu permasalahan masyarakat secara umum khususnya ibu hamil, balita, maupun masyarakat yang asupan gizinya belum terpenuhi. Program pembinaan kesehatan masyarakat terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : pembinaan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan keluarga, pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga, penyehatan lingkungan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknik lainnya program kesehatan masyarakat. Melalui beberapa kegiatan tersebut, permasalahan kesehatan di masyarakat dapat teratasi.

Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang bertujuan melayani masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan sehingga diharapkan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mampu meminimalisir bahkan mengatasi masalah tersebut, sehingga melalui kegiatan tersebut maka kinerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan. Untuk mengetahui pencapaian kinerja dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperlihatkan dan melaksanakan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja, maka perlu dilakukan penilaian atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut dengan pendekatan *value for money*. Penilaian ini diharapkan dapat mendorong Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian hasil kinerja organisasinya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pendekatan Value For Money”**.

1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Weygandt, Kieso dan Kimmel (2018 : 4), akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan.

1.2 Konsep Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2018 : 14) menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik

merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.

1.3 Konsep Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018:20) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan wewenang untuk pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik juga terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Mahsun (2018:86) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*)
2. Akuntabilitas Proses
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan

1.4 Konsep Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Mahsun (2018:25) menjelaskan bahwa kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan – tujuan atau target – target tertentu yang hendak dicapai.

Mahmudi (2017:6) juga menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu konstruk (*construct*) yang bersifat multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada kompleksitas faktor – faktor yang membentuk kinerja. Menurut Mahmudi (2017:6) pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

1.5 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja juga dimanfaatkan untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

1.6 Konsep Value For Money

Menurut Mardiasmo (2018:133) *value for money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik mencakup tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Terdapat tiga indikator utama dalam *value for money*, antara lain:

1. Ekonomi, yaitu pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi adalah perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Menurut Mahsun (2018:186) kriteria ekonomis adalah sebagai berikut:
 - a. Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka, ekonomis.
 - b. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka, ekonomis berimbang.

- c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka, tidak ekonomis.
2. Efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Menurut Mahsun (2018:187), kriteria efisiensi adalah sebagai berikut:
 - a. Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka, tidak efisien.
 - b. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka, efisiensi berimbang.
 - c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka, efisien.
2. Efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas adalah perbandingan *outcome* dengan *output*. Menurut Mahsun (2018:187) kriteria efektif adalah sebagai berikut:
 - a. Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka, tidak efektif.
 - b. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka, efektif berimbang.
 - c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka, efektif.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun pendekatan kualitatif ini menggunakan pola berpikir induktif, dengan melihat pola yang bersifat khusus ke umum. Permasalahan yang akan ditemukan berdasarkan dengan fakta yang ada dilapangan dengan berdasarkan fakta yang bersifat khusus, yang selanjutnya permasalahan tersebut akan diteliti untuk dipecahkan dan diambil kesimpulan secara umum.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yaitu Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2021 sampai selesai.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif berupa laporan akuntabilitas kinerja tahun 2019, sejarah organisasi, struktur organisasi, visi dan misi organisasi, serta tugas pokok dan fungsi organisasi. Sedangkan untuk data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan realisasi anggaran tahun 2019. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh penulis dengan meneliti langsung pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan hasil wawancara dengan beberapa informan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara seperti : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan serta staf/pegawai bagian keuangan.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan pegawai bagian keuangan.

2.5 Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan dokumentasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tahapan proses yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data dan dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini secara langsung

- dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Setelah seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, langkah selanjutnya penulis menganalisis data-data berupa Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 dan juga data perjanjian kinerja program pembinaan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 dengan menggunakan metode *value for money* yang menilai berdasarkan tiga indikator yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
 3. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Gereais F. Lumpele, SE selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan yang menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun anggaran 2019 adalah kegiatan/program pembinaan kesehatan masyarakat dan itu bisa dilihat di dalam LAKIP ada semua rincian kegiatan disitu.”

3.1.1 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Salah satu komponen sumber daya yang diperlukan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan adalah pembiayaan kesehatan. Berikut ini diuraikan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Menurut Program/Indikator Kinerja Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Tahun 2019 seperti tertuang pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Menurut Program/Indikator Kinerja Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Tahun 2019

No	Program/Indikator Kinerja Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	9.029.986.000	9.017.702.500
1.	Pembinaan Gizi Masyarakat	1.972.660.000	1.972.570.500
2.	Pembinaan Kesehatan Keluarga	1.903.500.000	1.893.937.500
3.	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	716.598.000	716.042.000
4.	Penyehatan Lingkungan	736.842.000	736.677.000
5.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.827.079.000	2.825.204.000
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Kesehatan Masyarakat	873.307.000	873.272.000

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Gereais F. Lumpele, SE selaku Kasubbag Perencanaan

dan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang menjelaskan bahwa :

“Untuk anggaran program pembinaan kesehatan masyarakat tahun 2019 sebesar Rp. 9.029.986.000, dengan realisasinya sebesar Rp. 9.017.702.500, itu dapat dilihat di dalam LAKIP”

3.1.2 Indikator dan Target Kinerja

Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Perjanjian Kinerja Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019

No	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pembinaan Gizi Masyarakat (68,83%)	1. Persentase ibu hamil kurang energi kronik yang mendapat makanan tambahan 2. Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD) 3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 4. Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 5. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan 6. Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	95 % 98 % 50 % 50 % 90 % 30 %
2.	Pembinaan Kesehatan Keluarga (76.43%)	1. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) 2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) 3. Persentase puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 1 4. Persentase puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 5. Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja 6. Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 7. Persentase puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	90 % 80 % 70 % 60 % 45 % 90 % 100 %
3.	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga (78.25%)	1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar 2. Jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI 3. Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar 4. Persentase puskesmas yang melaksanakan	80 % 730 100 %

		kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	60 %
4.	Penyehatan Lingkungan (43.16%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 2. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasa 3. Persentase Tempat-Tempat Umum yang (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan 4. Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar 5. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan 6. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat 	<p>45000</p> <p>50 %</p> <p>58 %</p> <p>36 %</p> <p>32 %</p> <p>386</p>
5.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (41.25%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS 2. Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM 3. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan 4. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung kesehatan 	<p>80 %</p> <p>50 %</p> <p>20</p> <p>15</p>
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Kesehatan Masyarakat (94 %)	Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program kesehatan masyarakat	94 %

S

u

umber Data : Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

3.1 Pembahasan

Pengukuran Kinerja Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Tahun 2019 Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan *value for money* yaitu pengukuran kinerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

1. Ekonomi

Kinerja program pembinaan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 ditinjau dari ukuran ekonomis yaitu berada pada posisi ekonomis dengan nilai perbandingan dibawah 100%. Mulai dari kegiatan pembinaan gizi masyarakat, kegiatan pembinaan kesehatan keluarga, kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga, kegiatan penyehatan lingkungan, kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program kesehatan masyarakat memiliki nilai rata – rata sebesar 99,90%

2. Efisiensi

Kinerja program pembinaan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 ditinjau dari ukuran efisiensi yaitu berada pada posisi berfluktuasi.

Pencapaian indikator kinerja dalam program pembinaan kesehatan keluarga serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program kesehatan masyarakat dapat dikatakan efisien sedangkan program yang lainnya masih belum efisien.

3. Efektivitas

Kinerja Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 ditinjau dari ukuran efektifitas pada umumnya berada pada posisi efektifitas berimbang. Indikator kinerja persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar belum dapat direalisasikan sehingga berada pada ukuran tidak efektif. Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan TKI sehingga belum ada jumlah fasilitas TKI yang memenuhi standar.

PENUTUP

Kesimpulan

Kinerja Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 ditinjau dari ukuran ekonomis yaitu berada pada posisi ekonomis dengan nilai perbandingan dibawah 100%. Sedangkan untuk ukuran efisiensi berada pada posisi fluktuasi dan untuk ukuran efektivitas berada pada posisi berimbang.

Saran

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam akuntabilitas pencapaian kinerja perlu memperhatikan capaian tingkat ekonomis, tingkat efisiensi, dan tingkat efektivitas atas program kerja yang direncanakan dan dapat menghindari biaya-biaya yang belum diperlukan

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat*. Jakarta.
- Halim, A. 2017. *Manajemen Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2017. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahsun, Muhamad. 2017. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*. BPFE. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Andi. Yogyakarta.
- Warren, Carl S., James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, Ersa T. Wahyuni, Amir A. Jusuf. 2017. *Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta
- Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E., dan Kimmel, Paul D. 2018. *Pengantar Akuntansi*, Edisi 8, Buku 2. Salemba Empat. Jakarta